

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT HUTAN DI KABUPATEN MAMASA,
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

VERAWATI

NIM. 530086739

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2025

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY PROGRAM POLICY TOWARDS INCOME IMPROVEMENT OF FOREST COMMUNITIES IN MAMASA DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE

Verawati

verawatisahabuddin@gmail.com

Graduated Studies Programme

Indonesia Open University

This study aims to analyze the implementation of the Social Forestry Program in Mamasa Regency using the policy implementation model of George C. Edward III, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The Social Forestry Program is a strategic government policy intended to promote community-based forest management to improve the welfare of forest-dependent communities in a sustainable manner. This research employs a descriptive case study method with a qualitative approach, supported by primary data collected through in-depth interviews with various stakeholders, including the Forestry Service of West Sulawesi Province, Forest Management Units (KPH), forestry extension officers, NGO facilitators, village governments, and forest farmer groups. The findings show that communication in this program has been relatively effective, facilitated through formal socialization and direct assistance that helps the target groups understand the program's objectives and procedures. The bureaucratic structure is considered straightforward and procedural, enabling easy access for communities to obtain permits and technical support. The disposition of implementers is generally positive, reflected in strong commitment, consistency, honesty, and democratic practices in engaging communities. However, financial resources remain the main obstacle, as funding from national and local budgets, as well as international grants, is limited, inconsistent, and does not reach all target groups. This condition has led to many groups with approved permits being unable to optimize their forestry activities. In conclusion, the success of the program is supported by good communication, implementer disposition, and bureaucratic structure, but constrained by inadequate financial resources that require more attention to achieve the policy's intended goals.

Keywords:

Implementation, Social Forestry, Income Increase, Forest Communities

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT HUTAN DI KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT

Verawati

verawatisahabuddin@gmail.com

Graduated Studies Programme

Indonesia Open University

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Mamasa dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Program Perhutanan Sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan secara lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh data primer melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, KPH, penyuluh kehutanan, NGO pendamping, pemerintah desa, dan kelompok tani hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam program ini berjalan cukup baik melalui sosialisasi formal dan pendampingan langsung yang mempermudah pemahaman kelompok sasaran. Struktur birokrasi dinilai sederhana, prosedural, dan mempermudah akses kelompok untuk memperoleh izin dan pendampingan. Disposisi implementor umumnya positif, tercermin dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan praktik yang demokratis dalam melibatkan masyarakat. Namun, sumber daya finansial menjadi kendala utama karena pendanaan tidak optimal, tidak rutin setiap tahun, dan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kelompok yang telah memperoleh izin belum dapat mengoptimalkan usaha kehutanan mereka. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Mamasa didukung oleh komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya finansial yang perlu mendapat perhatian lebih agar tujuan kebijakan tercapai secara menyeluruh..

Kata Kunci:

Implementasi, Perhutanan Sosial, Kenaikan Pendapatan, Masyarakat Hutan

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Program Perhutanan Sosial terhadap
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan Di Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat.”

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Majene, 11 Agustus 2025



VERAWATI
(NIM. 530086739)

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Vrawati/ 530086739
NIM : 530086739
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Perhutanan Sosial Terhadap
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan Di Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada

Hari/Tanggal : Kamis/ 06 November 2025
Waktu : 09.00 - 10.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Devi Ayuni, SE, M.Si

Tanda Tangan



Penguji Ahli
Nama : Prof.Dr. Bambang Supriyono, M.S



Pembimbing I
Nama : Dr. Obed Bida, S.Sos., MPA
NIP. 19741116 200212 1 002



Pembimbing II
Nama : Dr. Nani Harlinda Nurdin, M. Si.
NIDN. 0926036903



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Perhutanan Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusun TAPM : Verawati
NIM : 530086739
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 November 2025

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Obed Bida, S.Sos., MPA
NIP. 19741116 200212 1 002

Pembimbing II



Dr. Nani Harlinda Nurdin, M. Si.
NIDN. 0926036903

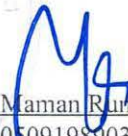
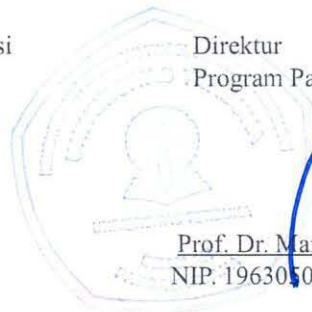
Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Administrasi Publik



Dr. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 196806121999032001

Direktur
Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si
NIP. 196305091989031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Perhutanan Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat”.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan program Perhutanan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan yang berada di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan TAPM ini membutuhkan perjuangan dan proses yang tidak mudah, namun dukungan dalam bentuk bimbingan, saran, materil, maupun motivasi dari berbagai pihak sehingga TAPM ini dapat terselesaikan sampai pada tahap akhir. Oleh karena itu penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak DR. Obed Bida, S.Sos, MPA dan Ibu DR. Nani Harlinda Nurdin, M.Si atas kesabaran dan ketulusan hati dalam membimbing penulis dari awal hingga penyelesaian TAPM ini.
2. Bapak Atjo Takdir S.Sos, M.Pd Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat atas bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
3. Responden yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas dukungan keterangan maupun masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan TAPM.
4. Terkhusus kepada keluarga ku terkasih : suami Nur Aona, ST, MAP beserta anak-anakku Muh. Rayhan H, Muh. Faqih H, Muh Daffaa Habib dan Aliyah Humaira Nur beserta Ibunda Hj. Nur Daya yang telah memberi dukungan cinta, doa, serta motivasi kepada penulis.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan yang diberikan kepada penulis selama penulisan TAPM ini mendapat ganjaran kebaikan dari Allah, SWT.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam penyusunan TAPM ini. Oleh karena itu kritik maupun saran konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan TAPM ini.

Majene, Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Verawati, S. Hut

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2017). Legalitas Perhutanan Sosial : Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Masyarakat Hutan. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2*, 98-99.
- Agustino, L. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Cetakan Kedua*. Alfabeta : Bandung.
- Alami. (2023, Juli 03). *Blog Hijrah Finansial*. Diambil kembali dari Pendapatan Rumah Tangga Keluarga : Pengertian dan Jenisnya:
<https://alamisharia.co.id/blogs/pendapatan-rumah-tangga-keluarga>
- Anthony Hall & James Midgley. 2004. *Social Policy For Development*. London : Sage Publications
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. (2024). Diambil kembali dari <https://mamasakab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten (Ribu Jiwa), 2024*. Sulawesi Barat, Indonesia.
- BPKH Wilayah VII Makassar. (2024). Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat.
- Budiardjo. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (1995). Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta.
- Cresswell, J. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix*. Penj. Ahmad Fawaid (edisi ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Dishut Sulbar. (2021). Data Perhutanan Sosial. *Bidang PDAS HL*.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gilarso, T. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta: Kanisius.
- Grace A Ripley, R. B. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press .
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2021). *Metodologi Penelitian Administrasi Edisi 3*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang kerjasama Penerbit "Widya Karya Semarang".
- Hubberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, N. (2015). *Metode Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta : Samudera Biru.
- Jatmikowati, S. H. (2021). A Study of Public Policy Implementation In E-Administration Services. *Academy of Strategic Management Journal Volume 20, Special Issue 2*, 1-23.
- Kata Data. (2022, Januari 31). *Diambil kembali dari Survey KIC: Program Perhutanan Sosial Meningkatkan Pendapatan Masyarakat :*
<https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/1632d4878c06d28/survei-kic-program-perhutanan-sosial-meningkatkan-pendapatan-masyarakat>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . (2023). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016. Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, Februari 19). *Kanal Komunikasi. Diambil kembali dari Mengenal Forest Programme V:*
<https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/mengenal-forest-programme-v/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Koran Tempo. (2023, November 17). *Diambil kembali dari Menggali Akar Kemiskinan Masyarakat Kawasan Hutan:*
<https://koran.tempo.co/read/lingkungan/485605/mengapa-masyarakat-kawasan-hutan-miskin>
- Marbuan, B. (2004). *Kamus Manajemen*. Jakarta, Indonesia: Bina Grafika.
- Mulyana, D. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Reja Rosdakaya.
 Diambil kembali dari <https://simdos.unud.ac.id/>

- Nandini, R. (2016). *Impact of Community Forestry Policy on Farmers in Rinjani*. Jejak, Journal of Economics and Policy Vol 9 No.2, 34-39.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nurwansyah. (2024). *Social Forestry in West Sumatra: A Review on Regulation and Its Implementation in Hutan Nagari Salibutan*. Jurnal Ilmu Kehutanan Vol. 18 No. 2, September 2024, 153-166.
- Putri, O. H. (2022). *Analisis Pendapatan Perkapita dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Perekonomian Daerah*. JAN Maha Vol.4 No.8 Agustus.
- Rahayu, S. (2024). *The Role of Local Governments in Supporting Social Forestry Implementation in Indonesia : A Social Network Analysis and Evidence from Eastern Indonesia*. Forest and Society Journal Vol.8 No. 1, June 2024, 154-178.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : Bina Grafika.
- Sahabuddin, C. (2021). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa*. Journal Peguruang: Conference Series/Volume 3, Nomor 2, November (2021)| eISSN: 2686–3472, 699-707.
- Setiawan, U. (2023). *Menggenjot Capaian Perhutanan Sosial*. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menggenjot-capaian-perhutanan-sosial/>.
- Soekartawi. (2002). *Faktor-Faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solichin, A. W. (1997). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi ke 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subagyo, A. W. (2000). *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Megister Ekonomika Pembangunan, 20.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNI Press.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian, Proses, dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Supriyanto, H. (2021). *Implementasi Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Telawa*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 18 No. 1, Mei 2021, 31-43.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufik, R. H. (2023, Desember 1). *Radio Republik Indonesia*. Diambil kembali dari beritapro3@rri.go.id: <https://www.rri.co.id/daerah/468161/keuangan-kabupaten-mamasa-defisit-rp-123-miliar-lebih>
- Taufiqurokhman. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK : Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method : Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, J. (2010). *Aalisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.